

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah konsep yang sangat umum dipergunakan dalam kehidupan masyarakat internasional (Hermawan, 2007 : 89). Selain itu, kemajuan globalisasi juga akan mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta transformasi di dunia. Oleh karena itu, fenomena tersebut mempengaruhi perkembangan kajian dalam studi ilmu hubungan internasional yang dahulu hanya membahas tentang *High Politic* yang lebih menekankan pada *Hard Diplomacy* berkembang menjadi *Low Politic* yang lebih menekankan pada *Soft Diplomacy* karena yang menjadi aktor dalam studi ini hanya *State Actor* sajamelainkan juga *Non-State Actor*. Gobalisasi juga tidak hanya mempengaruhi perkembangan aktor yang dibahas dalam studi ilmu hubungan internasional tetapi juga membuat semakin luasnya isu yang dibahas di dalamnya. Salah satu isu yang dibahas dalam studi ilmu hubungan internasional dewasa ini adalah isu kebudayaan.

Kebudayaan telah banyak dijadikan oleh suatu negara dalam menjalankan politik luar negeri negaranya di lingkungan internasional. Kebudayaan telah banyak dijadikan sebagai instrumen diplomasi yang dianggap tepat oleh beberapa Negara di dunia dalam mempererat hubungan negaranya dengan negara lain amupun untuk mempererat hubungan rakyat di suatu Negara dengan rakyat dari Negara lainnya. Penggunaan salah satu unsur budaya sebagai alat dalam diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ini dikenal sebagai diplomasi budaya.

Diplomasi budaya adalah penggunaan sarana budaya untuk meningkatkan pengaruh politik suatu bangsa. Sebagai bagian dari kebijakan luar negeri suatu negara, secara alami membawa implikasi politik. Dengan konsep ini, kegiatan budaya dilakukan bukan sebagai sarana politik untuk meningkatkan citra suatu negara, tetapi adalah untuk tujuan saling menginspirasi melalui pertukaran internasional (Ogoura Kazuo: 2009;44).

Salah satu negara yang menjadikan kebudayaan sebagai instrumen penting dalam menjalankan politik luar negeri negaranya adalah Jepang. Kebudayaan dijadikan oleh Pemerintah Jepang sebagai instrumen untuk menciptakan pandangan baru negaranya yang dahulu dikenal masyarakat internasional sebagai negara imperialis menjadi negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan bercitra baik.

Fokus Jepang terhadap pembangunan ekonomi negaranya yang telah sangat maju membuat dominasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan beberapa negara lainnya menimbulkan berbagai macam kecemasan dari rakyat di negara tersebut yang memandang Jepang dianggap sebagai negara penjajah yang hanya mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara ASEAN namun gagal memberikan ganti yang seimbang. Mereka bahkan menuduh para pengusaha Jepang melakukan lobi – lobi kotor dengan para pejabat lokal sehingga dapat memperoleh proyek apa pun yang mereka inginkan (Vogel 1988, hlm.65).

Bahkan ketika PM Jepang Tanaka Kakuei melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun 1974, terjadi demo besar – besaran di Indonesia pada tanggal 15 Januari 1974 atau yang lebih terkenal dengan peristiwa Malari. Keadaan itulah yang membuat Jepang harus mengevaluasi kembali politik luar negeri negaranya. Takeo Fukuda merubah kebijakan luar negeri negaranya yang dahulu hanya fokus kepada pembangunan hubungan dengan negara lain melalui diplomasi ekonomi kemudian berubah menjadi diplomasi kebudayaan. Kebijakan tersebut mulai dikaksanakan pasca pidato Perdana Menteri Takeo Fukuda pada KTT ASEAN pertama di Manila Filipina pada tahun 1977 dengan konsepnya yang disebut *Fukuda Doctrine* (Nakamura: 2015).

Esensi dari Doktrin Fukuda tersebut adalah :

- a. Jepang tidak akan pernah menjadi negara adidaya militer.
- b. Jepang akan menjalin hubungan dengan rasa saling pengertian dan rasa saling percaya terhadap negara–negara di Asia Tenggara.
- c. Jepang akan bekerjasama secara positif dengan seluruh anggota ASEAN sebagai mitra sejajar.

Pada prinsipnya doktrin tersebut berisi tentang prinsip Jepang yang tidak akan menjalankan hubungan luar negerinya tanpa kekuatan militer. Jepang akan lebih memperkuat hubungan negaranya dengan negara lain melalui *heart to heart understanding* dan membantu dalam menyelesaikan masalah Indo-china (Nakamura: 2015). Doctrin tersebut juga mempertegas keinginan Jepang untuk menjalin kerjasama baru antara negaranya dengan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang sosial dan kebudayaan.

Japan Foundation didirikan pada tahun 1972 dengan tujuan untuk menciptakan kesepahaman antara rakyat Jepang dan rakyat dari negara lain dan juga untuk manstabilkan kembali citra Jepang melalui pertukaran kebudayaan. Pendirian lembaga tersebut menjadi tanda perubahan politik luar negeri Jepang yang awalnya instrumen utamanya dengan ekonomi berubah menjadi kebudayaan. Melalui *Japan Foundation*, kebudayaan Jepang mulai diperkenalkan secara luas ke seluruh masyarakat internasional melalui berbagai macam kegiatan seperti seminar kebudayaan Jepang.

The Japan Foundation mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1979 dibawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang untuk Indonesia. The Japan Foundation pada awalnya didirikan di Indonesia bertujuan untuk membendung sikap anti Jepang oleh masyarakat Indonesia pada peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) yang terjadi pada tahun 1974 dimana terjadi unjuk rasa oleh masyarakat dan mahasiswa Indonesia sebagai bentuk protes terhadap dominasi ekonomi dari Jepang (Iyul Yanti: 2012).

Pemerintah Jepang mencoba meningkatkan diplomasi kultural (sebagai bentuk soft diplomacy). Melalui soft diplomacy ini, Jepang bertujuan untuk menciptakan understanding dengan cara aktivitas “misionaris” budaya Jepang. Seiichi Kondo, Direktur dari bidang pertukaran budaya MoFA Jepang mengatakan bahwa adanya improvisasi image Jepang dapat mendorong adanya *active personal and commodity exchanges* (*DiplomaticBlue BookMoFA*: 2005).

Soft diplomacy yang dijalankan oleh Jepang dengan menggunakan kebudayaan bertujuan untuk memperbaiki citra positif serta menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan melalui pemahaman budaya di berbagai negara, sehingga Jepang dapat mencapai kepentingan nasionalnya secara soft. Oleh

karena itu, Kementerian Luar Negeri Jepang (*Ministry of Foreign Affairs/ MOFA*) membentuk Japan Foundation sebagai agen untuk menyebarkan pengertian mengenai Jepang melalui kerjasama atau promosi-promosi di bidang kebudayaan agar tercipta saling pengertian diantara Jepang dengan negara-negara lain.

Fenomena kemajuan dan semakin berkembangnya kebudayaan Jepang di berbagai belahan Negara dunia membuat pemerintah merubah status *Japan Foundation* menjadi *independent administrative institution* pada tahun 2003. Perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi *Japan Foundation* dalam menyebarkan kebudayaan Jepang ke seluruh dunia yang dilakukan melalui pertukaran kebudayaan secara nasional dan internasional.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan mengoptimalkan peranan *Japan Foundation* sebagai sebuah lembaga nasional Jepang yang dibentuk untuk tujuan dalam menciptakan dan mencapai sebuah kesepakatan yang terjalin di antara negara-negara di dunia dengan negaranya.

Setelah perubahan status *Japan Foundation* pada tahun 2003. Maka program kerja *Japan Foundation* akan dipusatkan ke dalam 3 program utama sesuai dengan *article 3 the Japan Foundation Independent Administrative Institution Law* yang diantaranya adalah

1. *Arts and cultural exchange* dengan melakukan promosi dan pertukaran berbagai seni dan budaya Jepang ke seluruh dunia.
2. *Japanese-language education overseas* yang memusatkan pada pengembangan pendidikan bahasa Jepang di seluruh dunia.
3. *Japanese studies and intellectual exchange* yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama generasi muda di seluruh dunia tentang seluruh aspek seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, adat istiadat dan lain-lain melalui pertukaran intelektual dan studi tentang Jepang (*Japan Foundation Annual Report: 2003*).

Kawasan Asia Tenggara menjadi sasaran dari diplomasi budaya yang dilakukan Jepang tersebut. Kebudayaan Jepang yang semakin digemari oleh masyarakat Asia Tenggara terutama Indonesia membuat pemerintah Jepang terus meningkatkan promosi dan penyebarluaskan kebudayaan negaranya. Diplomasi budaya Jepang di ASEAN memberikan hasil yang sangat baik. Hal

tersebut ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat ASEAN yang mencintai budaya Jepang. Pada tingkat SMA dan mahasiswa. Indonesia tercatat sebagai negara ASEAN dengan angka tertinggi dalam minat belajar bahasa Jepang. Upaya nyata yang dilakukan pemerintah Jepang dalam meningkatkan minat akan budaya dan bahasa Jepang pada siswa SMA dan mahasiswa melalui Japan Foundation yang mendatangkan 2.000 guru bahasa Jepang ke Indonesia. Selain itu pemerintah Jepang memberikan berbagai beasiswa kepada masyarakat Indonesia, terutama untuk pendidikan pascasarjana (*Japan Foundation Annual Report: 2004*).

ASEAN merupakan kawasan yang menjadi basis produksi untuk industri manufaktur Jepang yang bertumpu di Thailand, Indonesia, dan kini merambah ke Vietnam. ASEAN terutama Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari jejaring produksi regional manufaktur Jepang (*regional production networks*), terutama bagi perusahaan multinasional besar seperti Toyota, Suzuki, Daihatsu, Matsushita, dll. Guna menlancarkan serta mempererat hubungan diplomatik Jepang dengan negara-negara tersebut, Shinzo Abe pun menerapkan diplomasi yang bersifat *soft* yakni diplomasi budaya guna meningkatkan hubungan kejasama Jepang dengan negara-negara tersebut terutama Indonesia. Indonesia menjadi Salah satu sasaran diplomasi kebudayaan Jepang. Indonesia yang merupakan negara terbesar di Kawasan ASEAN, memiliki posisi yang sangat penting bagi Jepang.

Bagi Jepang, Indonesia memiliki kriteria yang sangat ideal sebagai target penerapan strategi budaya populer dan memiliki posisi yang sangat penting bagi Jepang. Kedekatan historis membuat Jepang mendapatkan kemudahan dalam berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Hubungan diplomatik ini telah memposisikan Indonesia sebagai mitra strategis Jepang dalam berbagai aspek.

Hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dengan Jepang didasari oleh *Treaty on Amity Relations and Commerce* yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 1 Juli 1961. Indonesia diwakili oleh Menteri luar Negeri, Dr. H. Soebandrio. Persetujuan lainnya adalah : *Treaty on Air Service* 23 Januari 1962 , *Agreement in Science and Technoogy cooperation* 12 Januari 1981, dan *Agreement on the Avoidance of Doubi Taxation* 3 Maret 1982 (Kementerian Perdagangan Indonesia, 2007).

Komitmen Jepang ini dibuktikan dengan memberikan bantuan pemulihan ekonomi, memainkan peran kunci dalam mengatur penjadwalan kembali hutang-hutang Indonesia melalui IGGI dan mengambil bagian penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia melalui paket ODA (*Official Development Assistance*). Selama periode 1967-1980, Jepang merupakan investor terbesar di sektor-sektor *non-energi* di Indonesia dalam pemulihan ekonomi dan menguasai 41% investasi modal asing yang telah disetujui oleh pemerintah. Dengan meningkatnya popularitas budaya populernya, pemerintah Jepang kemudian berupaya untuk mengedepankan budaya populer sebagai instrumen diplomasi baru dalam mencapai kepentingannya. Strategi ini pertama kali tercantum dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri Jepang yang menjelaskan bahwa diplomasi dengan memanfaatkan budaya populer merupakan salah satu cara pemerintah Jepang untuk mendekati diri dengan publik, terutama para remaja dalam lingkup internasional (*Diplomatic Bluebook MoFA*, 2004).

Kebijakan pemerintah Jepang mengenai penggunaan budaya populer sebagai sebuah instrumen diplomasi publik sudah ditetapkan sejak tahun 2004 melalui *Diplomatic Bluebook* yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang. Salah satu isinya yakni mengedepankan dukungan terhadap perkembangan budaya populer serta menjadikannya instrumen bagi strategi diplomasi Jepang.

Diplomasi publik yang menggunakan instrumen kebudayaan atau dapat dikatakan juga sebagai diplomasi kebudayaan diharapkan mampu menjaga hubungan Jepang dengan negara-negara lain termasuk Indonesia. Diplomasi ini tidak hanya dilakukan antar pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia tetapi juga dilakukan terhadap masyarakat Indonesia oleh pemerintah Jepang melalui *Japan Foundation*. Dengan pertukaran kebudayaan yang dilakukan oleh lembaga tersebut diharapkan mampu membangun citra positif Jepang terhadap masyarakat Indonesia sehingga mampu menjaga hubungan di antara keduanya (Benny di dalam Shoelhi, 2011 : 158).

Program-program penyebaran budaya yang dilakukan *Japan Foundation* ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Jepang dan juga melibatkan perdana menteri Jepang dalam pelaksanaannya diantaranya adalah Perdana Menteri Shinzo Abe. Dalam kesempatan kedua memimpin, Abe meluncurkan serangkaian

kebijakan diantaranya adalah kebijakan ekonomi Shinzo Abe yakni Abenomics. Abenomics memiliki beberapa poin penting yang harus dicapai, seperti yang Pertama, Pemerintah Jepang fokus pada pemulihan ekonomi dan melepaskan Jepang dari deflasi berkepanjangan. Kedua, Jepang di bawah pemerintahan Abe berkomitmen memperkuat aliansi tradisionalnya dengan Amerika Serikat (AS) akan tetapi di satu sisi, meningkatkan hubungan dengan China di sisi yang lain.

Selain itu, kebijakan luar negeri oleh kabinet Abe yang menciptakan banyak konflik di asia timur. Konflik serta persaingan yang semakin meningkat antara negara asia timur membuat pengaruh dari *soft power* Jepang menurun (Seungik, 2015). Hal ini juga sejalan dengan menurunnya citra positif Jepang di Indonesia serta negara di Asia timur dan Asia Tenggara.

Abe mengubah mitos lama *Japanese uniqueness* menjadi jenis nasionalisme yang berbeda. Perdana Menteri Jepang itupun yakin bahwa revitalisasi ekonomi dan militer baru merupakan prasyarat penting untuk membangun kembali kepercayaan diri Jepang. Tapi Abe juga sadar bahwa untuk benar-benar menang atas bagian dunia lainnya, ia harus memenangkan hati dan pikiran konsumen global (*Quartz Media: 2016*). Dalam memenuhi tujuan memajukan citra Jepang yang indah dan dinamis, sekaligus tradisional dan modern Shinzo Abe pun juga menekankan Budaya sebagai alat politik untuk mewujudkan hal tersebut.

Ditambah lagi setelah terjadinya bencana alam pada tahun 2011 dan kebocoran reaktor nuklir di Fukushima sempat membuat perekonomian Jepang mengalami penurunan yang cukup besar, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat internasional termasuk dari Indonesia terkait keamanan nasional di Jepang bagi para wisatawan dan para pelajar yang ingin belajar di negara tersebut menurun bahkan hingga tidak diterimanya produk-produk dari Jepang karena adanya kekhawatiran sudah terkontaminasi oleh zat berbahaya dari reactor nuklir tersebut. Oleh karena itu, Perdana Menteri Shinzo Abe yang terpilih pada tahun 2012 memiliki tugas untuk memulihkan kembali keadaan Jepang (*Telegraph Media: 2011*). Oleh karena itu perubahan arah kebijakan luar negeri Jepang yang dilakukan Shinzo Abe menjadi sangat berbeda dari masa pemerintahan sebelumnya yakni Yoshihiko Noda dimana Abe lebih menekankan tujuan

memajukan citra Jepang yang indah dan dinamis dengan menggunakan budaya yang modern serta tradisional sebagai alat diplomasinya.

Keunikan budaya Jepang juga memperoleh penerimaan yang baik dari masyarakat, sehingga Jepang tidak perlu memikirkan resiko adanya penolakan dari masyarakat Indonesia. Respon positif Indonesia terlihat dari hasil polling opini terhadap Jepang, dari tahun 2008 hingga 2014 citra Jepang di Indonesia sebagai negara yang dapat dipercaya naik dari 44% menjadi 71%, kemudian opini Jepang sebagai negara yang “cool” juga naik dari 34% menjadi 40% kemudian peningkatan minat Indonesia terhadap budaya pop Jepang meningkat pesat dari 8% menjadi 52% pada 2014, ini menjadi bukti bahwa diplomasi budaya yang dilakukan Jepang mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia (MOFA 2014, hlm.1).

Dari beberapa penjelasan di atas. Maka peneliti merasa tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang bertemakan Diplomasi Budaya Jepang di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Shinzo Abe yakni pada tahun 2013-2016.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan masalah pada penelitian ini menjadi dua bagian yang di antaranya adalah sebagai berikut :

“Bagaimana bentuk diplomasi budaya yang dilakukan Jepang di Indonesia pada masa pemerintahan Shinzo Abe periode 2013-2016?”

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan latar belakang atau motif dari Diplomasi Budaya yang dilakukan Jepang di Indonesia.
2. Menganalisa bagaimana model atau bentuk kebijakan Diplomasi Budaya Jepang di era kepemimpinan Shinzo Abe

I.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademis**, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan, rujukan, maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang diangkat dan menjadi contoh Diplomasi Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang terhadap Indonesia pada periode tertentu.
2. **Manfaat Praktis**, yakni penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperluas pengetahuan serta wawasan pembaca serta memperoleh pengetahuan empirik mengenai Diplomasi Budaya Jepang di Indonesia. dan Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk menambah informasi.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian ini secara menyeluruh, maka penelitian ini dibagi menjadi 4 Bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang berisi literature review, kerangka pemikiran, alur pemikiran dan asumsi atau hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab yang berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan waktu dan lokasi penelitian

BAB IV : KEPENTINGAN JEPANG DALAM MELAKUKAN DIPLOMASI BUDAYA DI INDONESIA

Bab kedua akan membahas tentang kepentingan apa yang memfaktori Jepang melakukan diplomasi budaya di Indonesia.

BAB V : DIPLOMASI BUDAYA JEPANG DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SHINZO ABEPERIODE 2012-2016

Bab ketiga akan membahas mengenai bentuk atau model diplomasi budaya yang dilakukan Jepang di Indonesia pada masa pemerintahan Shinzo Abe yakni periode 2012-2016

BAB VI : PENUTUP

Bab keempat akan menjadi penutup dari hasil penelitian penulis. Bab ini merupakan jawaban pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis pada bab II dan bab III.

